

Judul : Pantauan DPR di Arab Saudi: Rumah Sewa Jamaah Haji Tak Layak Huni
Tanggal : Rabu, 23 September 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pantauan DPR Di Arab Saudi

Rumah Sewa Jamaah Haji Tak Layak Huni

PARLEMEN menemukan masih banyak yang tidak beres dalam pelayanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Pelayanan, pembinaan dan perlindungan Kementerian Agama terhadap para jamaah tidak optimal.

Misalnya, ada jamaah haji ditempatkan di rumah sewa tidak layak di daerah Umm Al-Jud, Makkah. Kualitas pemondokan jamaah haji khusus di Umm Al-Jud di bawah standar yang dijanjikan Kementerian Agama.

"Kawasan Umm Al-Jud itu berjarak sekitar 15 KM dari Masjidil Haram. Selain jauh, fasilitas juga memuaskan, kamar mandi kotor, tempat tidurnya tidak standar. Di mana layanan khususnya," kata Ketua Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR, Saleh Partaunang Daulay melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Karena itu, imbuah politisi Partai Amanat Nasional itu, Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR mendesak Kementerian Agama memantau pelayanan terhadap jamaah haji khusus.

"Fasilitas yang mereka ter-

ima sangat tak sesuai dengan biaya mahal yang dikeluarkan. Kementerian Agama juga harus melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji reguler," tegasnya.

Saleh menambahkan, jamaah haji khusus lebih rawan tertipu.

Menurut informasi yang dihimpun Tim Pengawas Haji DPR, penyedia jasa layanan haji khusus menggunakan sejumlah modus untuk 'menipu' para jamaah. Salah satunya, menempatkan jamaah khusus di hotel bintang lima, kemudian dipindahkan ke rumah atau apartemen sewaan dengan alasan sekadar transit.

"Faktanya, mereka menetap di sana selama 10-12 hari. Jauh lebih lama dari menetap di hotel bintang lima. DPR mengimbau masyarakat berhati-hati sebelum memutuskan memilih biro perjalanan menguruskan perjalanan ibadah haji," jelas dia.

Penilaian senada juga disampaikan tim pimpinan DPR yang diundang khusus Kerajaan Arab Saudi. Tim ini terdiri dari Ketua DPR Setya Novanto,

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen.

Pada Senin (21/9) lalu, mereka meninjau sejumlah lokasi perhajian di Arafah, Makkah. Mereka kecewa melihat fasilitas minim di tenda-tenda jamaah haji asal Indonesia di Arafah.

"Kami meninjau tenda-tenda jamaah haji di Arafah. Untuk ruang seluas ini hanya satu AC. Mungkinkah bisa dingin?" kata Jazuli Juwaini seperti dikutip Detikcom.

"Kenapa perlu ada tambahan AC, karena cuaca sangat panas, sekarang yang hampir jam 17.00 (21.00 WIB) kurang lebih 42 derajat panasnya," sambung politikus PKS itu.

Selain soal AC, rombongan pimpinan DPR itu juga menyoroti kondisi karpet yang menjadi alas di bawah tenda-tenda yang dibangun di padang Arafah itu. Kondisinya dianggap kurang mumpuni.

Mereka juga menggelar pertemuan dengan seluruh petugas haji Indonesia yang bertugas di Makkah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

yang ikut dalam pertemuan mengatakan, akan bekerja sekeras mungkin agar seluruh jamaah haji Indonesia terlayani sebaik-baiknya.

Fahri Hamzah mengharapkan agar ke depan pelayanan haji semakin baik, termasuk mendesak pemerintah agar melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait jumlah kuota jamaah haji asal Indonesia.

Kritik lain terhadap Kementerian Agama juga dilonarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad.

Ia meminta pemerintah serius mengantisipasi dan melindungi jamaah dari virus sindrom pernafasan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV.

Pasalnya, dampak wabah virus tersebut tak sekadar korban jiwa, tapi kerugian ekonomis.

Pemerintah harus ekstra protektif dan melakukan langkah-langkah antisipasi di Saudi Arabia maupun kesiapan menyambut kedatangan kembali di bandara.

"Jangan sampai ada jamaah haji kita terserang virus mematikan tersebut," ujar Senator wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat itu. ■ ONI